

**PERENCANAAN STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR TERPADU
DI KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN SERIBU UTARA,
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA**

Siti Amanah¹

Abstract

Integrated coastal management is aimed at coping and preventing resources destruction, assuring coordination amongst institutions involved at the resource exploitation and improving the quality human life. However, that approach can not be carried out without a well vision, clear missions and goals, and program establishment that take into account of the stakeholders interests and needs. Thousand islands as part of Jakarta region have been experienced over exploitation and too many stakeholders take benefits from the resources. Therefore, a well strategic planning to manage the resources is needed to ensure the resources sustainability as well as the welfare of the community.

Keywords:

strategic program planning, coastal management, and integrated approach.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah Kepulauan Seribu, merupakan bagian dari Provinsi DKI Jaya. Wilayah Kepulauan Seribu tersebut sangat kaya akan potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan yang meliputi sumberdaya hayati, non-hayati dan jasa lingkungan yang berfungsi sebagai modal dasar pembangunan. Potensi terumbu karang yang mengelilingi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu merupakan ekosistem yang baik untuk ikan-ikan karang dan kegiatan budidaya laut. Kepulauan Seribu sangat potensial pula dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Selain itu, terdapat hutan mangrove yang merupakan tempat berbagai jenis biota laut hidup dan berkembang biak. Sejak tahun 1995 di wilayah tersebut telah ditingkatkan statusnya dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan luasan 108.000 hektar.

Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat daerah ini adalah nelayan dan petani budidaya rumput laut. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar serta adanya kebutuhan pembangunan wilayah, maka tekanan terhadap Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu juga semakin meningkat. Tekanan tersebut terjadi dalam bentuk gangguan terhadap sumberdaya yang ada dan dilindungi, seperti pemburuan hewan-hewan yang dilindungi, pengambilan terumbu karang, penggunaan kompresor dan *potassium cyanide* saat menangkap ikan hias, tumpang tindih pemanfaatan dan

¹ Staf Pengajar Departemen Sosial Ekonomi Perikanan-Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

kewenangan antar berbagai pihak dalam mengeksploitasi pesisir dan lautan instansi dan lain-lain. Kondisi diatas menyebabkan terjadinya kerusakan dan penurunan potensi sumberdaya alam (efek terhadap lingkungan) yang berupa :

- a. Perusakan fisik habitat
- b. Pencemaran perairan laut
- c. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebih (*over exploited*)
- d. Kerusakan Biofisik lingkungan pesisir
- e. Tangkap lebih sumberdaya ikan
- f. Penangkapan ikan secara destruktif atau illegal
- g. Penebangan dan konversi mangrove
- h. Perusakan dan penambangan terumbu karang
- i. Erosi dan akresi pantai, tsunami, banjir (alami)
- j. Ketidakpastian dan kekosongan hukum
- k. Konflik kewenangan dan pemanfaatan SD pesisir
- l. Marginalisasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dll

Perusakan fisik habitat terjadi karena banyaknya pengambilan batu karang dan pasir laut untuk keperluan pembangunan. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan oleh penduduk setempat juga ada yang dilakukan penduduk luar. Bahkan ada beberapa perusahaan besar telah memperoleh izin untuk memanfaatkan pasir laut yang ada di perairan ini untuk dibawa ke Jakarta. Adanya kerusakan fisik habitat terumbu karang ini berdampak secara ekologis dan fisik, sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem dan penurunan hasil tangkapan nelayan setempat yang menangkap ikan di sekitar Taman Nasional tersebut. Adanya degradasi lingkungan dan multi konflik di lingkungan pesisir memicu diperlukannya suatu strategi pengelolaan pesisir terpadu (Cicin-Sain, B. dan Knecht R.W. 1998).

Dikemukakan oleh Biliana C. Sain dan Robert W. Knecht (1998:18) bahwa pendekatan terpadu sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat penggunaan laut dan pesisir dan kegiatan di daratan, mempunyai efek pada lingkungan laut dan pesisir, dan efek pengguna pesisir dan lautan akan saling mempengaruhi. Selain itu, adanya kenyataan bahwa pesisir merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, meningkatnya kegiatan pembangunan dan populasi penduduk dan makin berkurangnya sumber daya alam di daratan, yang menjadikan sumber daya kelautan dan pesisir menjadi tumpuan harapan keseimbangan pembangunan nasional di masa depan. Atas pertimbangan kondisi permasalahan di Wilayah Kepulauan Seribu itu, maka dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini difokuskan pada upaya perencanaan pengelolaan pembangunan di wilayah Kepulauan Seribu dengan mengambil kasus Pulau Pramuka dan Pulau Panggang

Tujuan Penulisan

Tujuan disusunnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di wilayah Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu ini tidak lain adalah:

- a. Mengaplikasikan teori tentang perencanaan pengelolaan pesisir terpadu pada kasus Kelurahan Pulau Panggang, Kep. Seribu.
- b. Sebagai proses pembelajaran di dalam menerapkan filosofi dan prinsip-prinsip Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

ANALISIS PERMASALAHAN

Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara terpadu, tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya alam guna menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang selalu pemanfaat utama sumberdaya pesisir dan lautan memiliki karakteristik spesifik (Tabel 1).

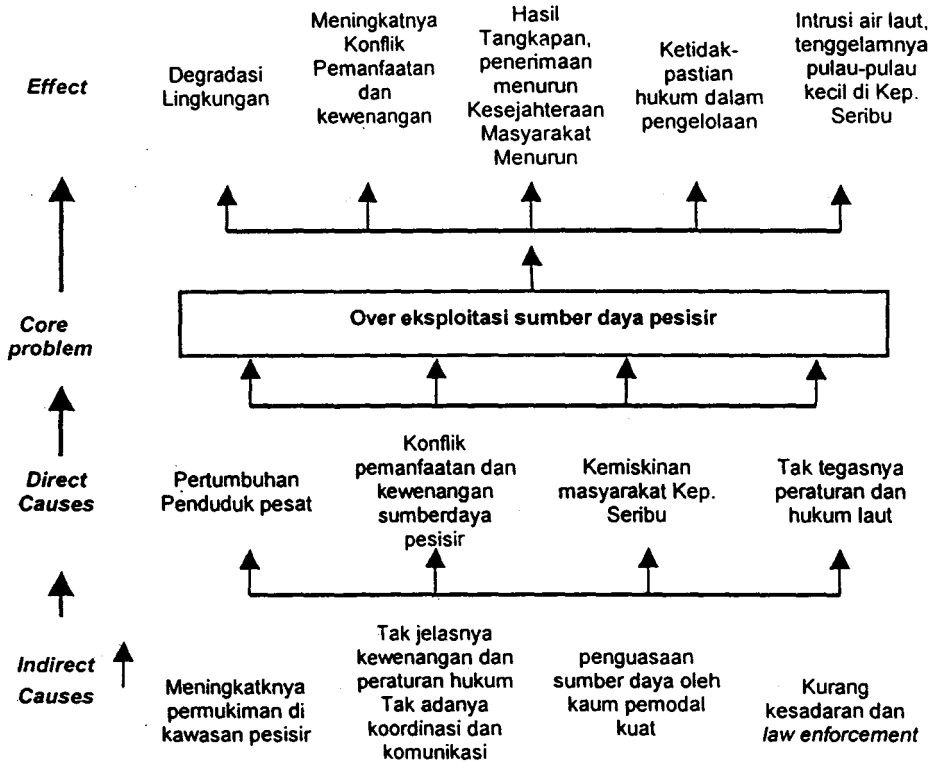
Tabel 1. Kondisi Spesifik Masyarakat Pesisir (Hanson, A. J. 1984)

Tipologi	Kondisi Spesifik
Ekologis/ Geografi	<ul style="list-style-type: none"> - Zona ekologi luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit. - Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam kegiatan satu hari pelayaran - Adanya keterbatasan dalam transportasi laut, pelabuhan atau alternatif untuk memanfaatkan bagian daratan - Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya seperti angin, arus air, dan berbagai masalah: malaria, kesulitan air bersih, banjir dan kekeringan, dan badai.
Ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan umumnya di bawah standar nasional - Kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh perbedaan sumberdaya, tipe armada dan alat tangkap, dan akses pasar - Sumber daya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian - Lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam membangun dan memelihara infrastruktur, investment agak sulit, dan modal berlebih di beberapa lapisan masyarakat
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke pelayanan sosial terbatas seperti layanan kesehatan dan pendidikan dibandingkan dengan di pedesaan di daratan, walaupun ada terkadang tidak sesuai dengan yang diperlukan - Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi untuk <i>self-help</i> yang memberdayakan masyarakat semacam koperasi perikanan, kelompok nelayan dan lain-lain - Keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi - Ketaktergantungan pada hukum positif, umumnya masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan sumber daya setempat - Adanya tindak kejahatan oleh orang-orang tertentu berupa pembajakan, pemukulan dan tindakan lain dan kurang diperhatikan oleh pemerintah

Dari Tabel 1 tampak bahwa masyarakat pesisir memiliki dihadapkan pada kondisi ekologis, ekonomis dan sosial yang spesifik. Oleh karenanya, guna mengetahui persoalan yang ada di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Sreibu Utara, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan pesisir dan lautan secara terpadu digunakan analisis masalah dengan pohon masalah (*problem tree*) sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.

Perilaku spesifik yang ditampakkan oleh pemanfaat dari sumberdaya pesisir dan lautan ada berbagai pola. Eksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan di Kepulauan Seribu, khususnya di kawasan Kelurahan Pulau Panggang sudah terlalu parah, terutama dalam hal penambangan karang illegal, penggunaan *potassium cyanide* dan kompresor, kerusakan mangrove dll. Akibat yang terlihat jelas adalah kerusakan terumbu karang, adanya beberapa pulau yang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu dan kerusakan hutan mangrove. Gambar 1 berupaya menganalisis permasalahan *over exploitasi* sumber daya pesisir dan lautan terpadu di Kelurahan Pulau Panggang.

Berdasarkan Gambar 1, jelas terlihat bahwa masalah *over eksploitasi* sumberdaya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh berbagai hal, baik langsung maupun tidak. Pada gilirannya, pengelolaan sumberdaya yang parsial, tak terpadu dan tak terencana, dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti degradasi lingkungan, meningkatnya konflik penggunaan dan kewenangan, Hasil Tangkapan, penerimaan menurun Kesejahteraan Masyarakat Menurun, Ketidak-pastian hukum dalam pengelolaan, Intrusi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kep. Seribu.



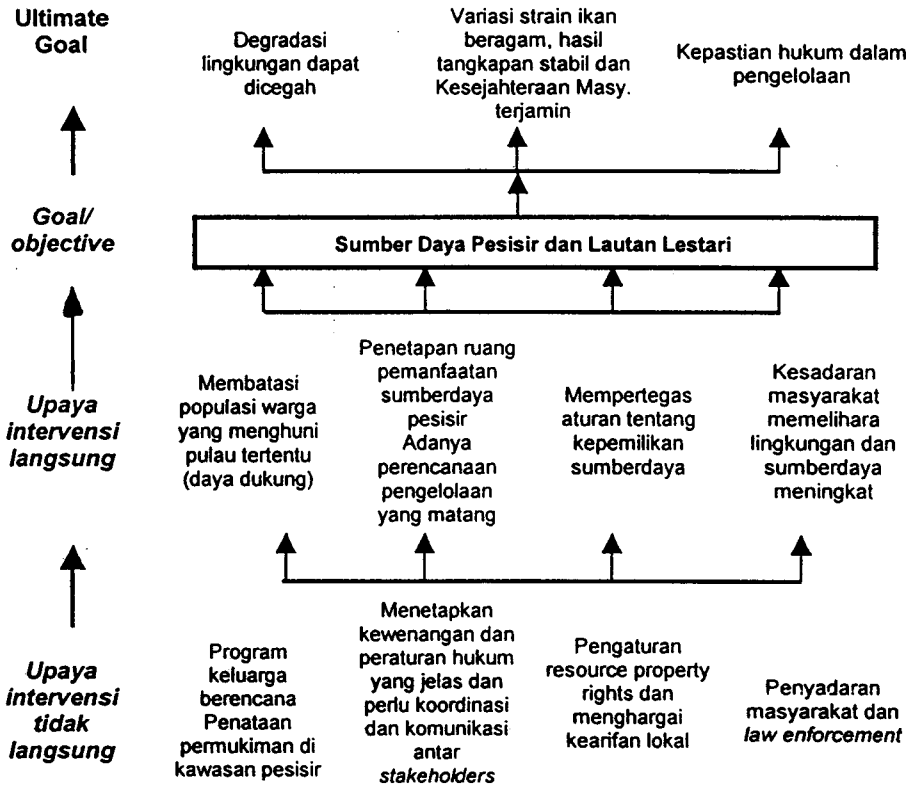
Gambar 1. *Problem Tree* Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu

STRATEGI PENANGANAN MASALAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN DI KELURAHAN PULAU PANGGANG

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam *problem tree* tersebut, maka pohon tujuan (*objective tree*) yang memperlihatkan garis besar tujuan pengelolaan adalah sebagai yang tampak Gambar 2. Tujuan yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan adalah Sumberdaya Pesisir dan Lautan Lestari bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

Dari Gambar 2, jelas terlihat bahwa penanganan masalah kerusakan sumberdaya pesisir dan lautan tak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan adanya perencanaan pengelolaan yang terpadu berbagai pihak terkait dalam pemanfaatan sumberdaya

tersebut. Terdapat lebih kurang 14 sektor yang terlibat dalam penggunaan sumberdaya pesisir dan lautan, yakni perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan, konservasi, perhubungan, lingkungan/tata ruang, pertanahan/agraria, pekerjaan umum, pertahanan keamanan, pemerintahan daerah dan keuangan.



Gambar 2. Objective Tree Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu

BATAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Hingga saat ini belum ada pendefinisian wilayah pesisir yang baku. Secara sederhana, wilayah pesisir dapat diartikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem laut dan daratan. Ada tiga pengertian tentang batas wilayah pesisir yaitu:

1. Ekologis: kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut; dan ke arah laut dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi.
2. Administratif : batas terluar sebelah hulu dari kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk propinsi.
3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir, misalnya: pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan memberikan

dampak di kawasan pesisir. Jika membahas tentang pengelolaan hutan mangrove, maka yang disebut pesisir adalah: batas terluar bagian hulu kawasan mangrove. Untuk kepentingan studi ini, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (Beatley et al 1994). Berdasarkan hasil rapat kerja nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and Planning* atau Perencanaan dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan) di Manado, 1 – 3 Agustus 1994, telah ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang ada dalam Peta Kelautan Nasional yang diterbitkan oleh Bakosurtanal. Batas ke arah darat mencakup batas administratif seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Ditjen Bangdes – Depdagri), yang termasuk wilayah pesisir MREP. Sedangkan yang dimaksudkan dalam studi kasus ini adalah wilayah kelurahan Pulau Panggang baik di daratannya maupun di laut antara pulau-pulau di kelurahan Pulau Panggang.

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: $106^{\circ}20'00''$ BT s.d. $160^{\circ}57'00''$ BT
 $5^{\circ}10'00''$ LS $5^{\circ}10'00''$ LS

Sebelah Timur $106^{\circ}20'00''$ BT
 $5^{\circ}10'00''$ LS

Sebelah Selatan : $106^{\circ}20'00''$ BT s/d $160^{\circ}59'00''$ BT
 $5^{\circ}59'00''$ LS $5^{\circ}59'00''$ LS

Sebelah Barat : $106^{\circ}20'00''$ BT s/d Pantai Utara Jawa
 $5^{\circ}10'00''$ LS

Kepulauan Seribu terdiri atas 110 pulau, dan 11 diantaranya dihuni oleh penduduk. Kabupaten ini terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Seribu Selatan, terdiri atas 3 kelurahan dengan 79 pulau. Kelurahan Pulau Panggang yang terdiri atas 13 pulau termasuk dalam Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kecamatan Seribu Selatan terdiri atas 3 kelurahan dengan 31 pulau. Studi kasus ini mengambil lokasi Kelurahan Pulau Panggang mengingat kondisi ekosistem di kawasan ini sangat memprihatinkan yakni kerusakan terumbu karang dan kerusakan mangrove yang jika dibiarkan terus akan mengganggu sumberdaya pesisir.

Ekosistem yang dominan di Kelurahan Pulau Panggang selain ekosistem laut adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun dan daratan pulau. Dengan demikian cakupan perencanaan pengelolaan pesisir terpadu ini akan melingkupi konteks pengelolaan sumberdaya tersebut.

VISI, TUJUAN DAN TARGET PENGELOLAAN

Visi Pengelolaan

Menjadikan sumberdaya pesisir dan lautan Kelurahan Pulau Panggang yang lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa kini, dan masa depan.

Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Kelurahan Pulau Panggang, dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- (a) Tujuan ekologi, untuk pelestarian sumberdaya pesisir yaitu upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang, padang lamun, pasir laut dan sumberdaya ikan.
- (b) Tujuan ekonomi, meningkatkan kontribusi sumberdaya perikanan dan kelautan terhadap taraf hidup masyarakat setempat, dan sumbangannya bagi perekonomian lokal, regional dan nasional.
- (c) Tujuan sosial budaya, dikembangkannya budaya lokal (adat istiadat, norma dan nilai-nilai lokal) yang mendukung upaya pelestarian sumberdaya pesisir dan lautan.
- (d) Tujuan kelembagaan, adanya penguatan kelembagaan antar sektor terkait dalam pelestarian sumberdaya pesisir. Adanya hukum dan peraturan yang jelas dalam pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan Kelurahan Pulau Panggang.

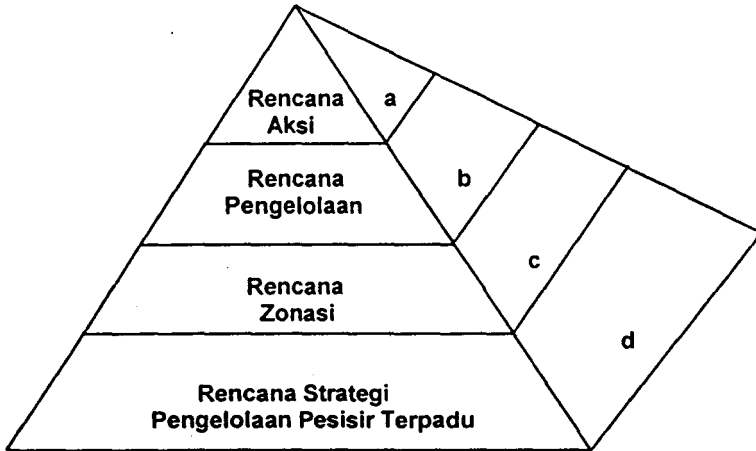
Dalam kasus di Kelurahan Pulau Panggang, keempat tujuan tersebut diupayakan dapat dicapai dengan prioritas pertama yakni tujuan ekologi, lalu diikuti dengan tujuan kelembagaan, sosial budaya dan ekonomi. Tujuan ekonomi hendaknya tidak mengalahkan tujuan lainnya.

Target Pengelolaan

Adapun target pengelolaan sumberdaya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang adalah:

1. Dikurangnya laju kerusakan terumbu karang;
2. Ditingkatkannya populasi mangrove
3. Diperluasnya areal padang lamun.
4. Dikurangnya penambangan pasir laut
5. Dikelolanya budidaya laut yang ramah lingkungan
6. Diversifikasi usaha masyarakat pesisir di Kelurahan Pulau Panggang, untuk mengurangi perilaku menyimpang dalam mengelola sumberdaya pesisir, sekaligus meningkatkan penghasilan nelayan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemanfaat sumberdaya pesisir untuk menjaga sumberdaya pesisir dan lautan
8. Eliminasi perilaku negatif seperti pengeboman karang, penggunaan *potassium cyanide*, dan kompresor.
9. Adanya koordinasi antar pihak pengguna sumberdaya pesisir
10. Ditegakkannya hukum dan peraturan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan yang adil dan bertanggung jawab.

Berikut (Gambar 3) merupakan visualisasi rangkaian kerangka kerja perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Dari visualisasi itu jelas terlihat bahwa tujuan dan target pengelolaan harus sesuai dengan visi pengelolaan yang merupakan landasan pembangunan menuju masa depan yang diinginkan.



Keterangan :
 a : Lokasi/implementasi Proyek, b : Panduan Daerah Prioritas Pemanfaatan Sumberdaya, c : Alokasi ruang dan Pengendalian Pemanfaatan, d : Visi dan Misi Daerah.

Gambar 3. Kerangka Kerja Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (DKP,2002)

DATA DAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN

Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu meliputi data teks dan numerik yang diperoleh dari data yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan sumber perolehannya, data yang diambil adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer yang diperlukan meliputi aspek ekologis, sosial ekonomi, organisasi dan kelembagaan (Tabel 2). Data tentang aspek ekologi, akan meliputi data biologi dan data fisik. Data biologi meliputi data tentang kondisi terumbu karang; mangroves; padang lamun, species yang dieksploitasi dsb. Sedangkan data fisik akan mencakup penggunaan sumberdaya alam, kondisi iklim; *fisiography*; *oceanography*, kualitas air, bencana alam, *coral bleaching* dsb.

Tabel 2. Data yang Diperlukan untuk Menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

No	Variabel	Keterangan
1	Data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Data demografi wilayah studi • Data sumberdaya alam (lahan, bakau, terumbu karang dll) • Data ekologis lain (rona lingkungan) • Data Produktivitas ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, industri dll

Lanjutan tabel 2

2		Data Primer
	Analisis kegiatan rutin masyarakat di pulau setempat	<p>Penggalian data tentang rutinitas kegiatan nelayan tangkap, pembudidaya, dan masyarakat pesisir lainnya</p> <p>Sistem usaha penangkapan, sistem usaha budidaya pantai, wisata dll dan kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang.</p> <p>Aktivitas yang secara negatif berpengaruh thd. Lingkungan di pesisir dan lautan seperti: pengeboman, penambangan pasir, minyak dll.</p>
	Isu sosial ekonomi dan kelembagaan	<p>Kepemilikan alat tangkap, armada, tenaga kerja</p> <p>Pendapatan, jenis usaha dan ukuran sosial ekonomi lainnya</p> <p>Isu pembangunan dan sosial</p> <p>Pelaku pembangunan utama (pemerintah, swasta dan lokal)</p> <p>Kelembagaan formal dan informal</p> <p>Adat istiadat yang berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan wilayah pesisir</p>
	Sumberdaya Alam	<p>Sumber utama mata pencaharian penduduk</p> <p>Produksi utama (perikanan, pariwisata, budidaya pantai dll)</p> <p>Penggunaan tenaga kerja</p> <p>Penggunaan input perikanan</p> <p>Ketergantungan pada sumberdaya alam, mangrove, rumput laut, ikan dll</p> <p>Kelestarian SDA dan lingkungan</p>
3	Program pembangunan dan proyek yang sudah berkembang di wilayah Kel. P. Panggang	<p>Sarana penunjang</p> <p>Siapa pembangun dan kapan dibangun</p> <p>Gagal atau sukses</p> <p>Perlu pengembangan atau tidak</p>
4	Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya terpadu di Kelurahan Pulau Panggang	<p>Jenis infrastruktur dan ukuran</p> <p>Siapa pengguna utama</p> <p>Sektor utama yang ditunjang</p> <p>Daya dukung infrastruktur bagi pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu</p>

Data sosial ekonomi meliputi rutinitas kegiatan nelayan tangkap, pembudidaya, dan masyarakat pesisir lainnya, sistem usaha penangkapan, sistem usaha budidaya pantai, wisata dan lain-lain dan kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat di wilayah setempat, aktivitas negatif dalam eksploitasi di pesisir dan lautan. Kepemilikan alat tangkap, armada, tenaga kerja, Kelembagaan formal dan informal, pranata yang berkembang, peraturan yang dibuat oleh masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang serta struktur masyarakat dan adat istiadat yang berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan wilayah pesisir, pengetahuan ekologi pesisir dan kesadaran, persepsi dan sikap masyarakat pesisir. Hal lain yang perlu digali pula adalah aspek demografi dan

komposisi penduduk, *property rights*, *property regimes* dan *tenurial*, *livelihood* dan mata pencaharian, konflik pemanfaatan dan kewenangan.

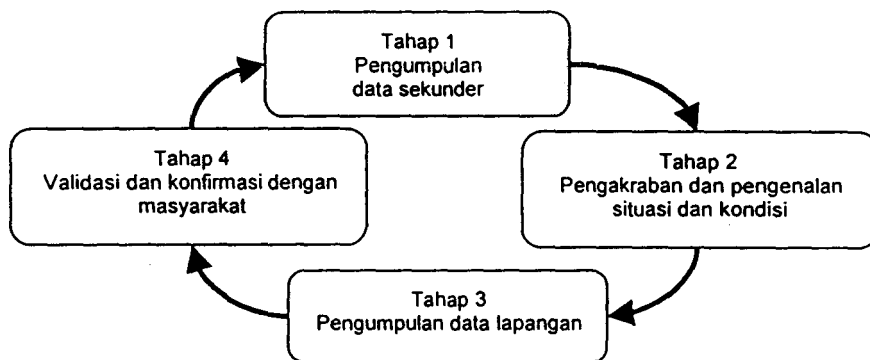
Data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu adalah data tentang Penerimaan Domestik Bruto perikanan dan laut di DKI Jakarta, penerimaan dan pengeluaran masing-masing sektor, dari Pusat Pengembangan Perikanan di DKI Jakarta, fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan dan potensi ekonomi perikanan dan kelautan.

Metode Pengumpulan Data

Guna mencapai tujuan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, maka akan digunakan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yang secara cepat dapat memperoleh aspirasi dan informasi penting dari masyarakat tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayahnya. RRA bersifat *explanatory* dan *participatory* (Sapta Ginting, 2003). RRA efektif digunakan dalam penyusunan rencana pengelolaan ini mengingat cakupan wilayahnya setingkat desa. Ada 3 tahapan RRA yaitu:

1. Pengambilan atribut data yang kontekstual
2. Pelaksanaan kegiatan lapangan dan
3. Perumusan hasil yang diharapkan

Beberapa teknik penggalan informasi yang akan digunakan adalah *semistructured interview*, *group interview*, *participatory exercise*, pembuatan diagram (peta *transect walk*) kegiatan masyarakat secara partisipatif, serta *problem and decision trees*. Secara skematik, alur pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan pesisir dan laut di Kelurahan Pulau Panggang ini dapat divisualisasikan seperti Gambar 4.

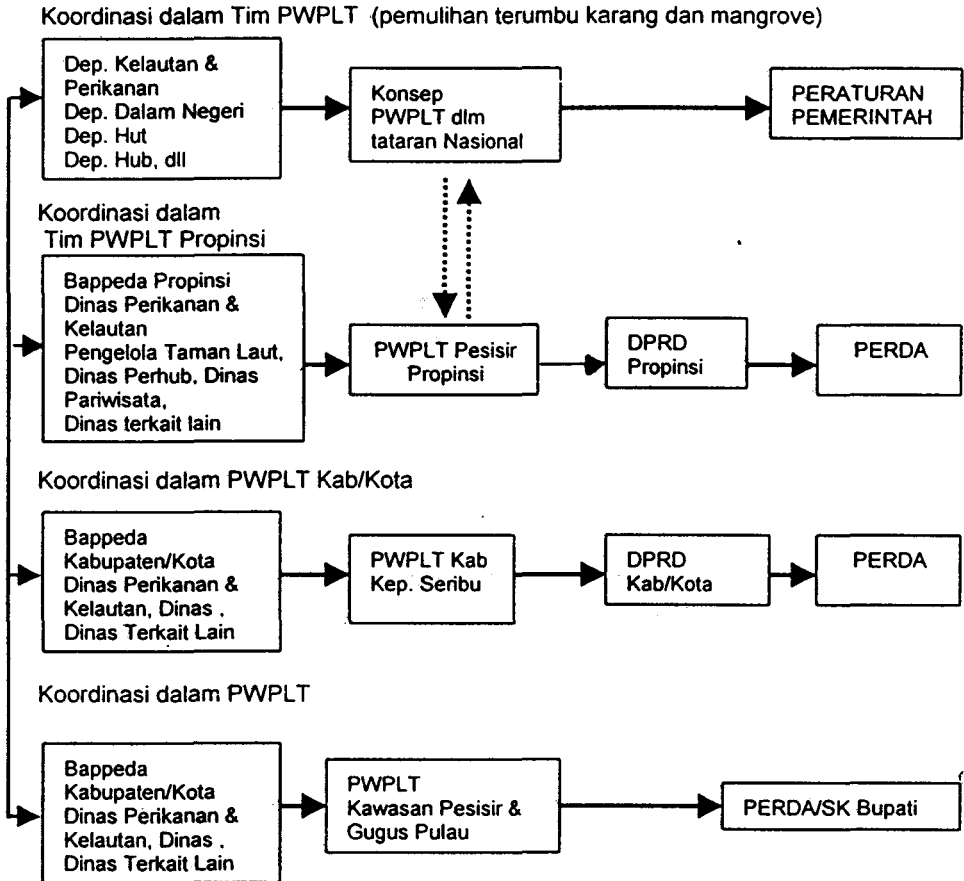


Gambar 4. Tahap Pelaksanaan RRA (Ginting, SP. 2003)

Melalui penggunaan RRA, diharapkan dapat diperoleh profil pengelolaan pesisir terpadu yang meliputi isu pengelolaan, keragaan dan trend kondisi biofisik, keragaan sosial-ekonomi dan kelembagaan, rencana strategis, rencana strategi di wilayah studi, agenda pembangunan dan rekomendasi kebijakan.

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR

Secara skematik aspek pengelolan sumberdaya pesisir dan lautan dapat disederhanakan seperti Gambar 5.



Gambar 5. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (DKP, 2002)

Dalam implementasi Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu di Kelurahan Pulau Panggang, tentunya dibutuhkan koordinasi lembaga yang terlibat (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 2001). Setiap lembaga memiliki peran, sebagaimana disebutkan berikut ini:

No	Lembagá Koordinasi	Peran
1.	Ktr. Meneg LH/Bapedal	Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya. BAPEDAL mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungan (AMDAL).

- | | | |
|----|---|--|
| 2. | DEPKEU/Dirjen Anggaran | Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumberdananya untuk menunjang implementasi program. |
| 3. | Depdagri/Dirjen Bangda | Mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Bangda, termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. |
| 4. | LIPI, Pusat Pengembangan dan Penelitian Oceanologi (P3O-LIPI) | Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, pusat informasi data ekosistem kelautan, dan memberikan saran untuk lembaga lainnya. |
| 5. | BAPPEDA Prov. Kabupaten Kota | Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah, khususnya Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang |

Panitia Ad – hoc

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Dewan Maritim Indonesia | Mengkoordinasikan penanganan masalah pembangunan kelautan dan perikanan |
| 2 | Kelompok Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota | Kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah |

Lembaga Sektoral

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Dep. Kelautan dan Perikanan | Mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi laut dll. |
| 2. | Dep.Kehutanan (Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam =PKA) | Mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan, seperti penetapan dan Taman Laut Nasional, Suaka Margasatwa Laut dll. |
| 3. | Dep. Perhubungan (Dirjen Perhub. Laut) | Bertanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai meduia transportasi, penanggulangan pencemaran laut dll) |
| 4. | Dep. Pertambangan dan Energi (Dirjen Minyak dan Gas) | Mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir (<i>on-shore</i>) dan lepas pantai (<i>off-shore</i>) |
| 5. | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Univ) | Bertanggung jawab dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan penelitian-penelitian terkait. |
| 6. | TNI AL (Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Dis-hidros) | Pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data, data hidrooseanografi dan memproduksi peta-peta wilayah laut |

- | | | |
|-----|---|--|
| 7 | Dep. Perdagangan dan Perindustrian | Pengaturan berbagai kegiatan pengembangan industri di wilayah pesisir dan lautan termasuk dalam hal penanganan limbah industri. |
| 8. | Dep. Permukiman dan Penyiapan Prasarana Pengem bangan Wilayah | Mengelola segenap kegiatan di bidang rekayasa pantai, seperti pembangunan infrastruktur, pencegahan erosi pantai dll. |
| 9. | Departemen Pariwisata | Mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan lautan (<i>Marine Ecotourism</i>) |
| 10. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Melaksanakan perencanaan dan program daerah di bidang kelautan dan perikanan, serta melakukan tugas perbantuan dari Dep. Kelautan dan Perikanan. |
| 11. | Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Ek. Lemah | Mengembangkan usaha perkoperasian di Indonesia, khususnya koperasi-koperasi perikanan (KUD Mina) di desa-desa pantai. |

Sejak diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisirnya sejak Mei 2001. Wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan kewenangan daerah Kabupaten dan Kota adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Pengaturan ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan batas kewenangan daerah di laut meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya laut dan kekayaan laut, kewenangan penataan ruang laut, kewenangan administratif dan bantuan penegakan hukum serta keamanan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dengan mempertimbangkan peran dari dimensi pemerintah, pasar dan masyarakat, dapat dirumuskan sebuah alternatif jalan keluar permasalahan yaitu dengan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat sebagai intinya. Sebenarnya kunci utama keberhasilan setiap program adalah bagaimana pendekatan yang diterapkan untuk menumbuhkan partisipasi anggota masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah menumbuh kembangkan partisipasi warganya (Kay, R. dan Alder, J. 1999), maka tidak lain aparat setempat bersikap wajar, tidak arogan, mampu berkomunikasi secara santun dengan masyarakat, mau belajar dari masyarakat senantiasa memahami isu-isu utama yang urgen untuk diselesaikan. Terdapat berbagai pendekatan pembelajaran untuk pengambilan aksi untuk penyelesaian isu yang dihadapi masyarakat (Pretty, JN. 1995) seperti sederetan nama berikut (disusun berdasarkan urutan abjad): *Agroecosystems Analysis(AEA)*, *Beneficiary Assessment, Development Education Leadership Teams (DELTA)*, *Diagnostico Rurale Participativo (DRP)*, *Farmer Participatory Research, Participatory Analysis and Learning Method (PALM)*, *Participatory Action Research (PAR)*, *Participatory Research Methodology (PRM)*, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Participatory Urban Appraisal (PUA)*, *Planning for Real, Process Documentation, Rapid Appraisal (RA)*, *Rapid Assessment of Agricultural Knowledge Systems (RAAKS)*, *Rapid Assessment Procedures (RAP)*, *Rapid Assessment Techniques (RAT)*, *Rapid Catchment Analysis (RCA)*, *Rapid Ethnographic Assessment (REA)*, *Rapid Food Security Assessment (RFSA)*, *Rapid Organisational Assessment (ROA)*, *Rapid Rural Appraisal*

(RRA), Soft System Methodology (SSM), Theatre for Development, Training for Transformation and Visualization in Participatory Programmes (VIPP).

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi mereka saja, akan tetapi perlu beberapa aspek yaitu adanya aspek situasional, kolaborasi dan evaluasi diri dari setiap unsur yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Utusan (baca: perangkat pemerintah daerah) yang ditugaskan membina masyarakat lokal mengembangkan empat aspek (Shumsky, dalam Kemmis dan McTaggart, 1988), yaitu:

- a. Suatu kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat dan rasa memiliki problem yang tengah dihadapi;
- b. Adanya kemampuan berkreasi dan pemikiran yang kritis;
- c. Program yang dilaksanakan adalah untuk tujuan perbaikan dan pengembangan; dan Kemampuan memfasilitasi masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

DASAR HUKUM UNTUK Mendukung PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR TERPADU

Adanya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah menggeser kewenangan pengelolaan wilayah laut, tentu termasuk pula kawasan pesisir dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Disebutkan dalam UU tersebut, bahwa propinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai (Pasal 10), sedangkan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan propinsi atau sejauh 4 mil laut. Jadi, Pasal 10 UU 22/99 memberi kewenangan bagi Pemda untuk mengelola sumberdaya pesisir secara lestari.

Beberapa unsur kebijakan yang terkait dan mendukung dilakukannya pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu adalah UU 5/1990, tentang Konservasi, UU 23/1992 tentang Lingkungan Hidup, UU 12/1992 tentang Budidaya Tanaman, UU 16/1992 Karantina Tanaman Industri, UU 9/1985 tentang Perikanan, UU 41/1999 mengenai Kehutanan, UU 5/1984 mengenai Perindustrian, UU 11/1967 tentang Pertambangan, UU 8/1971 tentang Pertamina, UU 9/1990 tentang Kepariwisata, UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, UU 5/1960 tentang Pokok Pokok Agraria, UU 21/1992 tentang Pelayaran, UU 20/1982 tentang Pertahanan Keamanan, UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, UU 1/1973 tentang Lardas Kontinen dan UU 17/1985 mengenai Ratifikasi UNCLOS, UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia, UU 5/1994 tentang Ratifikasi Biodiversity.

RENCANA AKSI AGAR PELESTARIAN SUMBERDAYA PESISIR BISA MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN DIKUTI MASYARAKAT

Penyiapan berbagai program pembangunan dalam pengelolaan pesisir dan lautan terpadu harus didasarkan pada kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan setempat. Atas dasar kondisi biofisik dan sosial ekonomi tersebut dapat diimplementasikan berbagai program terkait, dengan pelibatan aktif masyarakat pesisir mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut program. Aspek kelembagaan merupakan

faktor pengait dari keempat komponen pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, terutama antara program dengan implementasinya yang sangat diperlukan perannya dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu.

Kelembagaan memiliki dua pengertian yaitu pertama, kelembagaan sebagai institusi, yakni lembaga atau organisasi berbadan hukum untuk mengelola suatu kegiatan yang memiliki anggota, pendanaan dan fasilitas; dan kedua kelembagaan berarti pelembagaan nilai-nilai atau *institutionalization*. Dalam paparan berikut akan dijelaskan bagaimana aspek kelembagaan memainkan perannya dalam pengelolaan pesisir dan lautan terpadu. Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu di DKI, maka kelembagaan sebagai institusi dapat dikembangkan melalui tiga aspek:

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang terlibat di lembaga tersebut;
2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengoperasikan lembaga tersebut
3. Penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta pembangunan untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut.

Agar pelestarian sumberdaya pesisir bisa dijadikan kebijakan pemerintah daerah dan diikuti masyarakat, maka diperlukan rencana aksi dalam tataran praktis, sebagaimana diuraikan berikut. Ada beberapa rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk jangka waktu satu tahun (Tabel 3).

Tabel 3. Rencana Aksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu untuk Satu Tahun Pertama

No	Rencana Kegiatan	BULAN Ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembuatan <i>Data Base</i> : Inventarisasi data, identifikasi masalah, RRA	✓	✓											
2	Penyusunan Rencana Kegiatan, Penentuan Prioritas, penyusunan aturan pengelolaan sumberdaya dengan pihak terkait		✓	✓	✓	✓								
3	Persiapan sosialisasi, Socialisms program dan upaya program penyadaran pada masyarakat,						✓	✓						
4	Penegakkan aturan (<i>law enforcement</i>)							✓	✓	✓	✓	✓		
5	Pendampingan pada masyarakat pemanfaat sumberdaya – implementasi								✓	✓	✓	✓		
6	Analisis hasil sosialisasi: perubahan kognitif, afektif dan psikomotor: diskusi kelompok terfokus, <i>participatory mapping</i> dll										✓	✓		
7	Pelaksanaan berbagai program Pengelolaan								✓	✓	✓	✓		
	Monitoring dan evaluasi kegiatan												✓	
8	Tindak lanjut												✓	✓

PENUTUP

Berdasarkan paparan tentang Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dengan mengambil kasus Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, jelas bahwa rencana harus disusun dengan baik, melibatkan segenap unsur yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Perlu ditetapkan Visi, Tujuan, dan Target Pengelolaan secara jelas agar dapat dijadikan pedoman dalam implementasi kegiatan.

Perlu ada rincian lanjutan dari Rencana Strategis Pengelolaan agar dapat memberikan efek yang signifikan dalam menjadikan sumber daya pesisir lestari bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Terpadu sangat bermanfaat tidak saja bagi pemerintah daerah, namun juga bagi masyarakat, pihak swasta dan pihak lain yang turut memanfaatkan kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Beatley, T., D.J. Brower dan A.K. Schwab. 1994. *An Introduction to Coastal Zone Management*. Washington, DC: Island Press.
- Cicin-Sain, B. dan Knecht, R.W. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Washington, DC: Island Press
- Dahuri, R. 1995. *Proses dan Elemen Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Training Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, PPLH – LP IPB. Bogor: 3 April – 9 Sept. 1995.
- Dahuri, R. , Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. *Modul Sosialisasi dan Orientasi Penataan Ruang laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta : DKP.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, (DKP) RI. 2002. *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Jakarta: DKP.
- Ginting, S.S. 2003. *Bahan Kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Bogor: SPL-IPB.
- Hanson, A. J. 1984. *Coastal Community: International Perspectives*. Paper Presented at the 26 th Annual Meeting of the Canadian Commission for UNESCO, St John's Newfoundland, 6 th June 1984.
- Kay, R. dan Alder, J. 1999. *Coastal Planning and Management*. New York: E and FN. Spon. An imprint of Routledge.
- Kemmis dan McTaggart, 1988. *The Action Research Reader*. Victoria: Deakin University.
- Pretty, J.N. 1995. *Regenerating Agriculture*. London: Earthscan Publication Ltd.